



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TAJRI FAUZAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 775133

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.137.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 589 m2/250 m2 di KAB / KOTA KEPAHANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
2. Tanah Seluas 6 m2 di KAB / KOTA KEPAHANG, HASIL SENDIRI Rp. 302.000.000
3. Tanah Seluas 1.892 m2 di KAB / KOTA KEPAHANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KEPAHANG, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
5. Tanah Seluas 575 m2 di KAB / KOTA KEPAHANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 590 m2/590 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 3.100.000.000
8. Tanah Seluas 575 m2 di KAB / KOTA KEPAHANG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 168.000.000**

1. MOTOR, HONDA SPD MTR SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
155.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SPD MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 100.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.465.500.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.465.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.